

ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP BLUE

ECONOMY DI PESISIR PANTAI BANTUL

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun oleh:

Fikhi Cahyani

1800010127

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE BLUE
ECONOMY CONCEPT IN THE BANTUL COASTAL
JOURNAL**

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of economics



Written By:

Fikhi Cahyani

1800010127

**DEVELOPMENT ECONOMICS STUDY PROGRAM
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2023**

Analisis Implementasi Konsep Blue Economy di Pesisir Pantai Depok Bantul

Oleh:

Fikhi Cahyani (1800010138)

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UAD

ABSTRAK

Penerapan pengetahuan tentang konsep *blue economy* diterapkan di beberapa wilayah karena untuk menjaga tingkat stabilitas lingkungan khususnya disekitar pantai. Melihat peran pemerintah, nelayan dan khususnya masyarakat sekitar pantai dalam mendukung keberhasilan dalam penerapan konsep *blue economy*. Sehingga pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat perisisir Bantul mengenai *blue economy* dan untuk mengetahui implementasi *blue economy*. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia adalah salah negara yang mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya dengan merintis penerapan konsep *blue economy* di lingkungan pesisir pantai. Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian deskriptif untuk melihat kondisi pada lingkungan disekitar. Jenis data merupakan data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data merupakan data primer yang diperoleh melalui survei dalam bentuk data kuesioner dan observasi. Alat analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) seluruh nelayan belum mengetahui tentang konsep *blue economy*. 2) Penangkapan ini masih menggunakan alat tangkap yang sudah dilarang oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku yaitu Cantrang, berarti nelayan di Pantai Depok belum bisa sepenuhnya menerapkan *blue economy*. 3) Implementasi berdasarkan perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual yaitu dengan diolah telah memenuhi konsep *blue economy*. 4) Implementasi berdasarkan perlakuan terhadap ikan yang dilindungi yaitu dikembalikan ke laut untuk menjaga agar tidak punah.

Keywords: *blue economy*, Nelayan, Implementasi

ABSTRACT

The application of knowledge about the blue economy concept is applied in several areas because it is to maintain the level of environmental stability, especially around the coast. Seeing the role of the government, fishermen and especially the people around the coast in supporting the success of implementing the blue economy concept. So that this study aims to find out the understanding of the people of the

Bantul coast regarding the blue economy and to find out the implementation of the blue economy. The concept of sustainable development is one of the efforts to preserve the environment. Indonesia is one of the countries that supports the implementation of the concept of sustainable development, one of which is by pioneering the application of the blue economy concept in the coastal environment. In this research, descriptive research will be used to see the conditions in the surrounding environment. The type of data is quantitative and qualitative data. The data source is primary data obtained through surveys in the form of questionnaires and observation data. The analysis tool uses descriptive qualitative analysis. The research is descriptive qualitative in nature, namely a research method that describes the actual situation at the time of the research by collecting data which are then interpreted one another to obtain the formulation and analysis of the existing problems. The results of the study show that 1) all fishermen do not know about the blue economy concept. 2) These arrests still use fishing gear that has been banned by the government and the applicable regulations, namely Cantrang, meaning that fishermen on Depok Beach have not been able to fully implement the blue economy. 3) Implementation based on the treatment of unsellable fish, i.e. by processing it, fulfills the blue economy concept. 4) Implementation is based on the treatment of protected fish, namely returning them to the sea to prevent them from becoming extinct.

Keywords: blue economy, fishermen, implementation

PENDAHULUAN

Laut Indonesia mencapai kira-kira 5,8 juta km², sayangnya pemanfaatannya baru kurang lebih 59% dari total potensi sumber daya perikanan atau laut Indonesia (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011). Lautan ini, menyimpan potensi yang sangat besar di dalamnya, sumber daya hayati dan non hayati (Ghalidza, 2020). Komoditas perikanan sangat banyak diminati oleh banyak negara-negara maju dan merupakan komoditas ekspor yang unggul. Keanekaragaman hayati laut memiliki p negara maju, makmur dan mandiri (Mahyudin, 2008).

Upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, pemerintah telah menerapkan konsep *blue economy*. Konsep tersebut mengedepankan laut sebagai sumber daya utamanya dan diharapkan mampu membantu perekonomian nelayan. Dimana pada saat ini penduduk pesisir kurang diperhatikan dalam pembangunan ekonomi yang tercermin dari masih rendahnya tingkat harapan hidup masyarakat pesisir. Diperlukan gagasan yang bijak untuk mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di laut Indonesia agar kedepannya tercipta pembangunan yang tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan.

Blue economy adalah konsep optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin kelangsungan usaha dan kelestarian lingkungan. Pada dasarnya, *blue economy* merupakan paradigma pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip ekosistem (Sharif dkk, 2012). Ekonomi biru dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang berlandaskan pada pembangunan ekonomi kerakyatan secara menyeluruh untuk mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh. Pendekatan pembangunan berbasis *blue economy* akan bersinergi dengan penerapan strategi tiga arah: pro-poor (penurunan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-bisnis (penyerapan tenaga kerja) dan pro-lingkungan (proteksi terhadap lingkungan). program (Yusuf, 2012). Salah satu indikator tercapainya *blue economy* adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, yaitu mampu memenuhi kebutuhannya mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta meningkatkan pendapatan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat selama

menjalankan kegiatannya (Seperly, 2020).

Forum kerjasama ekonomi terbuka Asian Pasifik yaitu *Asian Pasific Economic Cooperation* (APEC) didirikan di Canberra, Australia pada November 1989 sebagai upaya untuk memajukan segala aspek kegiatan ekonomi di Asia Pasifik. Dengan 21 negara anggota antara lain Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang dan Korea Selatan. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah berkomitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* yang ditujukan sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan. Kesempatan ini dijadikan salah satu kegiatan guna mewujudkan kerjasama kemitraan antar anggota APEC dengan pelaksanaan ekonomi dengan model *blue economy*. Beberapa negara APEC yang telah menerapkan *blue economy* adalah Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Mexico.

Kerangka pembangunan *blue economy* diarahkan untuk mengoptimalkan keanekaragaman sumberdaya laut yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sumberdaya laut. Pengelolaan sumberdaya laut dan ekosistem laut diarahkan untuk bisa mengatasi tantangan degradasi pesisir, perubahan iklim, dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. *Blue economy* merupakan model baru yang menciptakan inovasi dan kreativitas baru.

Pengembangan Indonesia menuju negara maritim yang tangguh memiliki prospek yang sangat besar untuk diwujudkan. Besarnya potensi kelautan yang dimiliki Indonesia saat ini menjadi modal penting dalam perwujudan cita-cita tersebut. Tantangan yang muncul adalah perlu penyiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai potensi kelautan yang ada. Konsep *blue economy* merupakan salah satu langkah strategis yang mengarahkan pada SDM yang berkualitas dan berkarakter untuk kebutuhan pencapaian tujuan Indonesia menjadi negara maritim.

Tantangan Indonesia dalam mengembangkan *blue economy* adalah sektor perikanan tangkap diketahui bahwa sumber daya ikan makin menipis akibat

overfishing. Jika hal ini berlanjut maka pasokan ikan dari industri ini akan semakin berkurang. Untuk sektor industri kimia berbasis laut memiliki beberapa tantangan diantaranya: a) industri didominasi oleh UMKM; b) daya tampung unit pengolahan pangan berbasis laut pada umumnya masih rendah; c) kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis sumber daya manusia terhadap standar produksi, serta rendahnya jaminan kualitas produk dan bahan baku; d) resiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan; dan e) perubahan dinamis dalam preferensi konsumen. Untuk menjalankan strategi *blue economy* di Indonesia terdapat strategi dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya laut, mobilisasi insentif dan investasi (pengelolaan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah untuk lingkungan yang berkualitas jauh dari kerusakan), sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data sumberdaya laut (pengelolaan perikanan, ekosistem, *green economy*, dan dampak dari kegiatan masyarakat), membangun sistem pengelolaan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan. Bank Dunia juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan strategi *blue economy* melalui berbagai jenis investasi, seperti : Program Laut Sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, program rehabilitas dan pengelolaan terumbu karang, dan program pembangunan pariwisata terintegritas dan berkelanjutan.

Tujuan dilakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Konsep Blue Economy di Pesisir Pantai Depok Bantul ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat perisisir Bantul mengenai konsep *blue economy* pesisir pantai Desa Kretek Bantul?
2. Untuk mengetahui implementasi *blue economy* pesisir pantai Desa Kretek Bantul?

METODE

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan karakteristik tertentu dari sebuah fenomena yang menjadi pusat perhatian. Penggunaan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menggambarkan topik menarik

dengan bentuk deskriptif penelitian kualitatif.

Lokasi : berada di Pantai Depok, Desa Samiran Kecamatan Kretek Yogyakarta. Metode : *cross section*. Dalam penelitian ini jrnis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data bersumber dari data sekunder dengan narasumber nelayan melalui kuesioner penelitian. Kuisioner yang digunakan yaitu kuesioner secara terbuka, dimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut langsung dijawab secara jujur dan sesuai dengan kondisi terkini.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif. Jumlah sampel yang digunakan merupakan sampel berdasarkan pendapat Roscoe yang menyatakan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2018). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 nelayan dan 10 usaha.

Blue Economy

Blue Economy merupakan gagasan baru dalam pembangunan yang berorientasi padasektor kelautan sebgai fokus utama. Dalam pengembangannya diperlukan inovasi yang tinggi agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Istilah *blue economy* sebuah pemikiran yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan menjaga lingkungan dibidang kelautan dan perikanan. Konsep *blue economy* berpusat pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, dan dengan dukungan dari Commonwealth Secretariat banyak negara sekarang sedang menilai nilai ekonomi potensial atau perairan laut mereka. Tujuan *blue economy* adalah bagaimana pemakaian sumber daya alam secara efesien, tidak ada lagi limbah, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat dan menjaga ekosistem kelautan. Oleh karena itu, perlu gagasan dan wawasan mengenai pengembangan ekonomi kelautan yang handal, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun sistem hukum laut yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata.

Indikator *blue economy* secara mikro didasarkan pada peraturan dan konsep-konsep mengenai *blue economy*. Secara ringkas indikator yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Definsi Operasional Blue Economy

| No. | Indikator | Ukuran | Sumber |
|------------|-----------------------------------|---|--|
| 3. | Proses penangkapan | Cara menangkap ikan k. Jaring biasa l. Alat peledak m. Setrum n. Bahan kimia o. Lainnya ... | c. UU No. 45 Tahun 2009. d. <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995</i> : |
| | | Jenis alat tangkap yang digunakan: k. Jaring lingkaran tanpa tali kerut l. Jaring tarik (cantrang) m. Jaring hela n. Jaring insang (gillnet) o. Lainnya | Permen KP No. 2 Tahun 2015 d. Pukat Hela (<i>trawls</i>) e. Pukat Tarik f. Lampara, Dongol, Cantrang, Payang Menurut Permen KP No. 71 Tahun 2016 c. Pukat Hela d. Pukat Tarik |
| 4. | Perlakuan terhadap ikan tangkapan | Perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual a. Diolah b. Dibuang c. Dipelihara | <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995</i> : |
| | | Perlakuan terhadap ikan yang dilindungi (ikan langka, ikan kecil, anak ikan, atau ikan yang tidak masuk kriteria tangkapan) e. Dijual f. Dikembalikan kelaut g. Dipelihara h. Lainnya | c. <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995</i> : d. Dikutip dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

Implementasi Blue Economy

Blue economy memberikan arti bahwa lautan biru langit biru sehingga ketika laut itu terjaga dan tidak tercemar maka habitat ikan juga akan terjaga. Laut yang sehat memberikan hasil yang berlimpah. Pengetahuan yang harus diberikan pada nelayan adalah bagaimana menjaga kelestarian laut, salah satunya adalah menggunakan alat tangkap yang tidak merusak trumbu karang, karena hal tersebut dapat merusak ekosistem laut.

Tabel 1.2. Pengetahuan Nelayan tentang *Blue Economy*

| No. | Uraian | Frekuensi | Proporsi |
|-----|-------------------------|-----------|----------|
| 1 | Mengetahui | 0 | 0% |
| 2 | Tidak Mengetahui | 30 | 100% |

Hal ini mungkin ada kaitannya dengan belum adanya penyuluhan dari Lembaga terkait. **Tabel 1.2** menunjukkan bahwa semua nelayan menyatakan belum pernah memperoleh penyuluhan tentang blue economy.

Tabel 1.3 Penyuluhan *Blue Economy*

| Penyuluhan | Frekuensi | Proporsi |
|-----------------------|-----------|----------|
| Pernah mendapat | 0 | 0% |
| Tidak Pernah Mendapat | 30 | 100% |
| Jumlah | | 100% |

Secara garis besar terdapat 2 indikator implementasi *blue economy* yaitu proses penangkapan dan perlakuan terhadap ikan tangkapan.

c. Proses Penangkapan

3) Cara Menangkap

Nelayan di Pantai Depok memiliki berbagai alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan. Cara menangkap ikan semuanya menggunakan jaring biasa, tidak ada yang menggunakan alat peledak, setrum, dan bahan kimia. Nelayan sadar akan menjaga ekosistem laut maka dari itu mereka tidak memakai alat tangkap yang bisa merusak ekosistem laut dan membahayakan ikan yang dilaut. **Tabel 1.4**

menyajikan cara menangkap ikan. Indikator ini merujuk pada UU No. 45 Tahun 2009 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995).

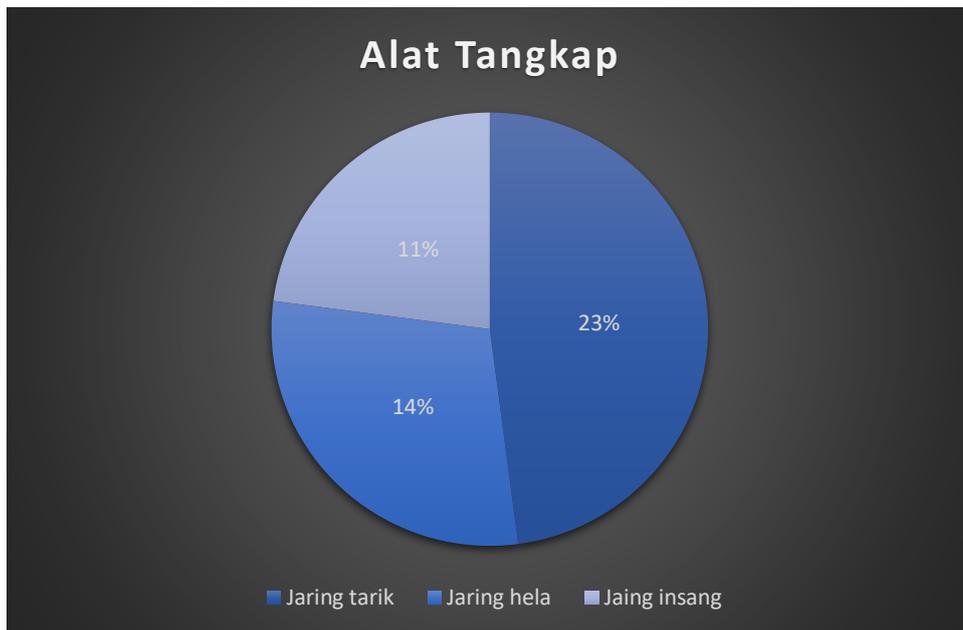
Tabel 1.4 Cara Menangkap Ikan

| Cara Menangkap Ikan | Frekuensi | Proporsi |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Jaring Biasa | 30 | 100% |
| Alat Peledak | 0 | 0% |
| Setrum | 0 | 0% |
| Bahan Kimia | 0 | 0% |
| Jumlah | 30 | 100% |

4) Jenis Alat Tangkap

Indikator selanjutnya adalah jenis alat tangkap, apakah menggunakan alat tangkap yang dilarang. Indikator ini berdasarkan pada Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang penggunaan alat Pukat Hela (*trawls*), Pukat Tarik, Lampara, Dongol, Cantrang, Payang. selain menurut Permen KP No. 71 Tahun 2016 tentang Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Beragam jenis alat tangkap yang digunakan oleh Nelayan. Terdapat 3 alat tangkap yang sering digunakan oleh Nelayan di Pantai Depok jaring tarik (*cantrang*), jaring hela, dan jaring insang. Terdapat alat tangkap dalam penggunaan khususnya alat tangkap jaring tarik (*cantrang*). Jaring tarik sangat mendominasi dalam kegiatan melaut oleh Nelayan sebesar 23%, diikuti oleh penggunaan jaring hela sebesar 14%, dan yang lumayan jarang digunakan adalah jaring insang yaitu sebesar 11%.



Sumber : data primer diolah

Gambar 1.1 Responden Berdasarkan Jumlah Alat Tangkapan

Cantrang merupakan alat tangkap ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar kemudian dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang dan kedua ujung tali selambar dipertemukan, kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik kearah kapal sampai seluruh bagian kantong terangkat. Cantrang dilarang untuk digunakan karena penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

2) Perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual

Tabel 1.5 menyajikan perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual oleh nelayan, Indikator ini berdasarkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO (1995)*. Dalam melakukan penangkapan saat melaut, ada beberapa ikan yang ikut serta tertangkap dan minim peminatnya. Mereka akan membuat olahan ikan tersebut dirumah makan untuk dijual atau dijadiin makanan sehari-hari. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa implementasi berdasarkan perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual yaitu dengan diolah.

Tabel 1.5 Perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual

| Ikan yang tidak laku dijual | Frekuensi | Proporsi |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Diolah | 30 | 100% |
| Dibuang | 0 | 0% |
| Dipelihara | 0 | 0% |
| Jumlah | | 100% |

3) Perlakuan terhadap ikan yang dilindungi

Perlakuan terhadap ikan yang dilindungi berupa ikan langka, ikan kecil, anak ikan, atau ikan yang tidak masuk kriteria tangkapan oleh nelayan disajikan pada **Tabel 1.6** menyajikan perlakuan terhadap ikan yang dilindungi. Ikan yang ditangkap tidak sesuai target akan dikembalikan kelaut agar ekosistem terjaga dan tidak menyebabkan kepunahan. Indikator ini didasarkan pada *Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995*).

Tabel 1.6 Perlakuan Terhadap Ikan yang Dilindungi

| Perlakuan Terhadap Ikan yang Dilindungi | Frekuensi | Proporsi |
|--|------------------|-----------------|
| Dijual | 0 | 0% |
| Dikembalikan | 30 | 100% |
| Dipelihara | 0 | 0% |
| Jumlah | | 100% |

Konsep *blue economy* merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan menjaga kesehatan ekosistem laut. *Blue economy* sebenarnya adalah simbol kegiatan industri khususnya industri perikanan yang pro lingkungan. Implementasi nelayan secara tidak langsung sudah menerapkan indikator-indikator *blue economy*, hanya saja mereka masih menggunakan alat tangkap Cantrang dan secara materi atau pengetahuan para nelayan belum mengetahui apa itu *blue economy*. Hal ini dikarenakan belum adanya penyuluhan tentang *blue economy* oleh para pemerintahan setempat untuk warga dan nelayan. Selama ini pemerintah hanya membuat peraturan perundang-undang tentang *blue economy* tetapi untuk observasi

kepada masyarakat setempat belum mendapatkan penyuluhan tentang *blue economy*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil kesimpulan

1. Nelayan di Pantai Depok belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *blue economy*.

2. Implementasi *blue economy* oleh nelayan di Pantai Depok berbeda dalam indikator sebagai berikut :

a. Perlakuan

1) Implementasi berdasarkan perlakuan terhadap ikan yang tidak laku dijual yaitu dengan diolah telah memenuhi konsep *blue economy*.

2) Implementasi berdasarkan perlakuan terhadap ikan yang dilindungi yaitu dikembalikan ke laut untuk menjaga agar tidak punah.

b. Penangkapan ini masih menggunakan alat tangkap yang sudah dilarang oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku yaitu Cantrang, berarti nelayan di Pantai Depok belum bisa sepenuhnya menerapkan *blue economy*.

SARAN

1. Salah satu indikator *blue economy* yang belum terpenuhi adalah penggunaan alat tangkap Cantrang. Untuk itu beberapa hal perlu dilakukan :

a. Pemerintah diharapkan menentukan aturan yang berkelanjutan agar peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan secara konsisten.

b. Sosialisasi terhadap pengetahuan terkait *blue economy* harus dilaksanakan di setiap daerah.

c. Monitoring dan evaluasi peraturan terhadap implementasi *blue economy* dilapangan.

d. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

2. Adanya sosialisasi kepada masyarakat terhadap konsep-konsep dan implementasi *blue economy*, agar masyarakat Indonesia khususnya di pesisir Pantai Depok segera

menjadi negara yang menerapkan *blue economy*. Sehingga laut Indonesia tetap menjadi sustainable.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2016). *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perikanan (Studi pada Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di ...*
[http://repository.ub.ac.id/161886/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/161886/1/Rizki Ananda.pdf](http://repository.ub.ac.id/161886/%0Ahttp://repository.ub.ac.id/161886/1/Rizki%20Ananda.pdf)
- Banu, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 27–31.
<https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1907>
- Chandra, Y. A. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.27>
- Ramadhan, I., & Hakim, M. F. (2019). *Journal Blue Economy daerah Pesisir Berbasis Kelautan dan Perikanan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- (Ilma, 2016) Banu, N. M. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 27–31.
<https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1907>
- Ilma, A. F. N. (2016). Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan.
Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 14(1).
<https://doi.org/10.20961/jiep.v14i1.2112>
- Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN a. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.

Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914–1928.

Wiratma, H. D., & Nurgiyanti, T. (2019). Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep Green Economy dan Blue Economy. *Nation State Journal of International Studies*, 2(2), 161–172.
<https://doi.org/10.24076/nsjis.2019v2i2.164>